Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
5 (3) 2025, Page: 27299-27311

Kegemaran Flexing Sebagai Habitus Para Pejabat Publik di Media Sosial Sebagai Pemicu Demonstrasi di Indonesia 2025

Shafa Nada Nur Afifah
Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Soedirman
Shafa.afifah@mhs.unsoed.ac.id

Published: Oktober, 2025

ABSTRAK

Fenomena flexing yakni perilaku pamer kekayaan di ruang publik digital telah menjadi bagian dari praktik simbolik yang dilakukan oleh sejumlah pejabat publik Indonesia. Dalam konteks sosial-politik Indonesia 2025, praktik ini tidak hanya menimbulkan kemarahan publik, tetapi juga menjadi salah satu pemicu gelombang demonstrasi di berbagai daerah. Dengan menggunakan pendekatan teori habitus dari Pierre Bourdieu, penelitian ini menganalisis bagaimana kebiasaan flexing dikonstruksi sebagai bagian dari gaya hidup kelas elite birokratik, dan bagaimana media sosial memperkuat eksposur serta resistensi terhadap praktik tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik studi literatur terhadap pemberitaan media online, unggahan media sosial, serta dokumentasi demonstrasi terkait isu gaya hidup mewah pejabat selama tahun 2025. Temuan menunjukkan bahwa perilaku flexing merupakan hasil dari internalisasi modal simbolik dalam habitus pejabat yang dibentuk sejak lama. Namun, dalam kondisi ketimpangan sosial dan keterbukaan digital, praktik ini membentuk antagonisme kelas yang memicu ledakan ketidakpuasan publik. Media sosial berperan ganda sebagai medium ekspresi status dan alat kontrol sosial. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa kegagalan dalam mengelola citra pejabat dapat berdampak sistemik terhadap stabilitas sosial-politik.

Kata Kunci: habitus, flexing, pejabat publik, demonstrasi, media sosial, Indonesia 2025

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Era digital telah mengubah cara kehidupan manusia menjadi semakin transparan dan terkoneksi. Pergeseran batas antara ruang privat dan publik terjadi secara signifikan. Media sosial kini menjadi wadah ekspresi yang tidak hanya bersifat personal, tetapi juga politis dan simbolik. Unggahan visual seperti foto, video pendek, dan cerita harian bukan sekadar representasi diri, melainkan instrumen membangun citra, memperkuat posisi sosial, dan menegosiasikan kekuasaan. Fenomena "flexing" atau perilaku memamerkan kekayaan/status sosial melalui media sosial mulai menjadi sorotan publik.

Awalnya, flexing banyak diasosiasikan dengan selebritas, sosialita, atau influencer yang menjadikan gaya hidup sebagai bagian dari kapitalisasi personal. Beberapa tahun terakhir, fenomena ini mulai merambah kalangan pejabat publik yang seharusnya memegang etika publik. Unggahan barang mewah seperti tas, mobil sport, jam tangan mahal, atau liburan glamor yang dilakukan pejabat dan keluarganya tidak sekadar menunjukkan rasa syukur atau hak pribadi. Melainkan menjadi klaim simbolik atas status sosial dan kekuasaan. Hal ini memunculkan pertanyaan etis dan moral terkait kelayakan gaya hidup pejabat yang dibiayai uang rakyat.

Kondisi ketimpangan sosial yang tajam semakin memperburuk persepsi publik. Data ekonomi terbaru menunjukkan beberapa persoalan struktural di Indonesia tahun 2025: tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,76% (7,28 juta orang) per Februari (BPS, Bisnis.com, 5 Mei 2025), inflasi pangan berkepanjangan mencapai 6,36% yoy pada Juli (BPS, CNBC Indonesia, 1 Agustus 2025), serta kemiskinan ekstrem tetap tinggi di wilayah tertinggal (0,85% atau 2,38 juta orang) meskipun menurun (BPS, Detik Finance, 15 Juli 2025). Indeks Persepsi Korupsi Indonesia hanya naik tipis dari 34 ke 37 (TI,

Kompas.com, 11 Februari 2025), sedangkan kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum stagnan di angka 54,3% (LSI, Tempo.co, 20 Agustus 2025). Dalam konteks ini, kemewahan pejabat lebih dipandang sebagai simbol ketimpangan yang menyinggung rasa keadilan kolektif.

Flexing menjadi praktik yang sarat muatan politis dan menimbulkan pertanyaan struktural: dari mana asal kekayaan tersebut? Apakah diperoleh secara sah dan transparan? Apakah mencerminkan semangat pelayanan publik atau justru pengkhianatan terhadap moral kekuasaan? Pertanyaan ini muncul tidak hanya dalam ruang akademik, tetapi menjadi diskursus publik yang membakar emosi kolektif. Kritik yang dimulai dari komentar dan sindiran di media sosial berkembang menjadi aksi nyata, seperti demonstrasi yang mengangkat isu gaya hidup mewah pejabat, dorongan transparansi aset, dan tuntutan reformasi birokrasi. Contohnya, kampanye "17+8 Tuntutan Rakyat" (Detik.com, 28 Agustus 2025) serta dorongan pengesahan RUU Perampasan Aset sebagai respons sorotan harta tidak wajar pejabat (Detik.com, 15 Maret 2023; Kompas.id, 2023).

Ketegangan simbolik antara elite dan rakyat makin nyata. Elite tidak lagi dipandang semata sebagai pengelola negara, tetapi juga figur moral yang diharapkan menunjukkan integritas, kesederhanaan, dan solidaritas sosial. Gagalnya pejabat publik dalam merepresentasikan nilai-nilai tersebut menyebabkan krisis legitimasi.

Teori habitus Pierre Bourdieu memberikan penjelasan kritis. Habitus adalah sistem disposisi terbentuk dari pengalaman sosial dalam struktur kelas tertentu yang mengarahkan cara berpikir, merasa, dan bertindak (Bourdieu, 1977). Pilihan gaya hidup mewah yang tampak alami sebenarnya hasil internalisasi nilai kelas dominan dalam ruang sosial. Pejabat yang berasal dari elite atau kekuasaan memiliki akses modal ekonomi, sosial, budaya, dan simbolik yang saling memperkuat, menciptakan kebiasaan menampilkan status melalui konsumsi prestisius. Dalam ruang digital, ekspresi ini terekam dan tersebar instan. Flexing bukan hanya pertunjukan gaya hidup, tetapi alat reproduksi kekuasaan simbolik.

Kesadaran digital dan literasi kritis masyarakat mengubah media sosial menjadi arena pertarungan wacana. Publik dapat merespons, mengkritik, dan mendekonstruksi simbol kekuasaan. Akun pengawas publik seperti @cabinetcouture_idn, @pansusanggaran, dan komunitas antikorupsi menjadi aktor resistensi simbolik, membongkar kemewahan pejabat, mengedukasi publik, dan membangun narasi tandingan. Media sosial berubah dari tempat flexing menjadi arena disrupsi hegemoni, tempat nilai kesederhanaan, transparansi, dan integritas diperjuangkan aktif oleh masyarakat sipil digital.

Demonstrasi sepanjang 2025 merupakan akumulasi frustrasi struktural lama yang dipicu oleh flexing sebagai katup emosi kolektif. Simbol kemewahan yang mengukuhkan kekuasaan dapat menjadi bumerang politik bila publik menilai simbol tersebut tidak pantas atau sah. Studi fenomena flexing pejabat publik adalah kajian sosiologis penting yang mencerminkan ketegangan antara struktur kekuasaan, legitimasi, dan resistensi dalam masyarakat kritis.

Penelitian ini bertujuan menganalisis reproduksi dan kritik flexing sebagai ekspresi habitus elite dalam ruang digital, serta dampaknya terhadap konflik simbolik yang berujung demonstrasi sosial. Pendekatan menggunakan teori habitus Bourdieu, konsep hegemoni Antonio Gramsci, dan dinamika media sosial sebagai arena kontestasi makna dan kekuasaan diharapkan memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam memahami relasi simbol, kekuasaan, dan masyarakat di Indonesia kontemporer.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Menurut Sudaryanto (2015), penelitian deskriptif dalam kajian sosial dan kebahasaan merupakan penelitian yang tidak mengubah data dalam proses analisisnya, melainkan memaparkan serta menguraikan data sebagaimana adanya berdasarkan konteks yang dikaji. Pendekatan deskriptif kualitatif digunakan dalam penelitian ini untuk menggambarkan dan menjelaskan bagaimana fenomena *flexing* atau pamer kekayaan oleh pejabat publik dibingkai dan dimaknai di media sosial, serta bagaimana hal tersebut berkontribusi dalam membentuk opini publik hingga memicu gelombang demonstrasi di Indonesia sepanjang tahun 2025.

Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memahami dinamika sosial dan simbolik dari praktik *flexing* sebagai bagian dari habitus pejabat publik, serta melihat bagaimana emosi kolektif masyarakat

terbangun melalui respons digital dan aksi massa. Penelitian ini tidak berfokus pada pengujian hipotesis kuantitatif, melainkan pada eksplorasi mendalam terhadap wacana-wacana yang muncul di ruang publik digital terkait gaya hidup mewah pejabat negara.

Untuk memastikan keabsahan data, peneliti menetapkan kriteria sumber data yang relevan, aktual, dan memiliki pengaruh dalam pembentukan opini publik. Adapun **sumber data** dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Media daring terkemuka, seperti *Kompas.com, Detik.com, Tempo.co, Tirto.id, CNN Indonesia,* dan *Liputan6.com* sebagai representasi media arus utama yang menyajikan pemberitaan tentang gaya hidup pejabat.

- Konten media sosial dari platform seperti *Twitter/X, Instagram, dan TikTok*, yang menampilkan unggahan viral terkait flexing oleh pejabat publik atau keluarganya, serta tanggapan netizen yang menunjukkan reaksi emosional atau kritik sosial.

- Dokumentasi aksi demonstrasi, termasuk poster, spanduk, orasi, dan pernyataan publik yang merefleksikan adanya kekecewaan dan kemarahan terhadap gaya hidup mewah pejabat negara.

- Literatur ilmiah sebagai landasan teori dan konsep analisis, seperti teori habitus dari Pierre Bourdieu dan teori afeksi sosial dari James Jasper.

Berdasarkan Data Indonesia Digital Report (2025) dan pemantauan tren media sosial sepanjang Januari–Agustus 2025, sumber-sumber di atas merupakan kanal utama masyarakat dalam memperoleh dan membentuk opini terhadap isu pejabat dan kekuasaan.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi dan teknik catat, sebagaimana dijelaskan oleh Sudaryanto (2015), bahwa teknik catat merupakan metode untuk merekam dan mencatat data setelah dikumpulkan, baik melalui alat tulis maupun media digital. Teknik dokumentasi digunakan untuk mengarsipkan tangkapan layar unggahan viral dan pemberitaan daring, sementara teknik catat dipakai untuk menyalin informasi penting, seperti kutipan, narasi, maupun simbol yang muncul dalam data tersebut.

Tahapan pengumpulan data meliputi:

1. Menelusuri kasus flexing pejabat yang menjadi viral di media sosial.

2. Mengumpulkan artikel dan berita dari media daring terkait pejabat yang melakukan flexing.

3. Mencatat dan mendokumentasikan reaksi publik, baik dalam bentuk komentar, meme, thread, maupun aksi demonstrasi di lapangan.

4. Mengidentifikasi tema-tema dominan dalam wacana publik, seperti moralitas pejabat, ketimpangan sosial, dan resistensi digital.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis wacana kritis dan analisis framing model Robert N. Entman, yang terdiri dari empat tahapan utama, yaitu:

1. Define problems – mendefinisikan flexing sebagai persoalan sosial-politik yang berkaitan dengan legitimasi kekuasaan.

2. Diagnose causes – mengidentifikasi aktor atau sistem yang dianggap sebagai penyebab ketimpangan simbolik.

3. Make moral judgement – menilai tindakan pejabat dari sudut pandang etika sosial dan keadilan.

4. Suggest remedies – menelusuri harapan publik atau rekomendasi perubahan sebagai bentuk resolusi konflik simbolik.

Selain itu, digunakan pula analisis habitus dan modal Bourdieu untuk melihat bagaimana flexing merupakan bentuk ekspresi simbolik dari posisi kelas pejabat publik, serta analisis emosi publik (Jasper, 1998) untuk memahami bagaimana perasaan kolektif—seperti marah, muak, dan kecewa—berkontribusi dalam membentuk aksi kolektif seperti demonstrasi.
Langkah-langkah analisis dilakukan sebagai berikut:
1. Klasifikasi Data: Mengelompokkan berita dan konten media sosial berdasarkan isu, aktor, dan reaksi publik.

2. Analisis Framing dan Wacana: Menggunakan model Entman untuk membaca posisi media dan respons publik terhadap isu.

3. Interpretasi Teoritis: Menafsirkan hasil analisis dalam kerangka teori sosial untuk memahami makna simbolik dan implikasinya.

4. Deskripsi Naratif: Menyajikan hasil analisis dalam bentuk uraian deskriptif agar dapat dipahami secara kontekstual dan mendalam.

Teknik Penyajian Data
Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan secara **informal**, yaitu menggunakan **bahasa naratif dan deskriptif**, sebagaimana dijelaskan oleh Sudaryanto (2015:241), bahwa metode penyajian informal menggunakan bahasa biasa dalam bentuk uraian naratif yang bertujuan untuk memudahkan pembaca memahami hasil analisis secara lebih utuh dan komunikatif.
Batasan Penelitian
Penelitian ini memiliki beberapa batasan sebagai berikut:
- Tidak seluruh pejabat publik yang melakukan flexing dikaji, melainkan hanya kasus-kasus yang viral dan memicu reaksi publik secara luas di media sosial atau aksi nyata di lapangan.

- Penelitian tidak memverifikasi kekayaan pejabat secara hukum atau administratif, melainkan menganalisisnya sebagai representasi simbolik dan bentuk persepsi sosial.

- Studi ini difokuskan pada periode Januari hingga Agustus 2025, yang menjadi rentang waktu utama terjadinya eskalasi wacana dan demonstrasi terkait gaya hidup mewah pejabat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemetaan Hasil Lean Canvas

Elemen Lean Canvas	Isi Penelitian	Penjelasan
Problem (Masalah)	Ketimpangan simbolik dan material akibat flexing oleh pejabat di tengah krisis sosial-ekonomi.	Pejabat memamerkan gaya hidup mewah saat rakyat mengalami kesulitan, memicu kemarahan dan delegitimasi simbolik.
Customer Segments (Pihak Terkena Dampak)	Masyarakat umum, netizen, mahasiswa, LSM, aktivis digital, institusi negara.	Flexing pejabat berdampak langsung pada kepercayaan publik, terutama masyarakat kelas bawah yang merasa tidak diwakili.
Solution (Solusi yang Dituntut)	Regulasi gaya hidup pejabat, transparansi, pengawasan publik, edukasi etika digital, peringatan resmi dari pemerintah.	Publik menuntut pejabat bersikap lebih sensitif dan tidak menampilkan kemewahan sebagai simbol kekuasaan.

TABEL 1: MASALAH, SEGMENTASI, DAN SOLUSI

Elemen Lean Canvas	Isi Penelitian	Penjelasan
Unique Value Proposition (Nilai Unik Penelitian)	Flexing bukan sekadar perilaku pribadi, tapi ekspresi dari habitus kelas dominan yang ditolak publik.	Penelitian ini membongkar dimensi sosial dan simbolik dari flexing sebagai bagian dari reproduksi kekuasaan elite.
Channels (Saluran Penyebaran)	Media sosial (TikTok, X, Instagram), media online, aksi demonstrasi, meme politik.	Media sosial menjadi arena baru tempat pertarungan simbolik antara elite dan rakyat terjadi secara real-time.
Revenue Streams (Keuntungan Sosial)	Peningkatan kesadaran publik, kritik terhadap elite, dorongan perubahan kebijakan.	Penelitian ini menghasilkan "keuntungan sosial" berupa tekanan moral terhadap elite dan desakan reformasi simbolik.

TABEL 2: NILAI, SALURAN, DAN KEUNTUNGAN SOSIAL

Elemen Lean Canvas	**Isi Penelitian**	**Penjelasan**
Cost Structure (Dampak Sosial / Biaya)	Delegitimasi negara, krisis kepercayaan, disrupsi politik, konflik elite–rakyat.	Flexing menciptakan biaya sosial tinggi karena mengganggu kesetimbangan simbolik dan menimbulkan ketegangan horizontal.
Key Metrics (Indikator Penting)	Jumlah kasus viral, engagement netizen, frekuensi demo, respon pejabat.	Keberhasilan pengaruh flexing terhadap publik diukur dari seberapa besar viralitas dan reaksi sosial yang muncul.
Unfair Advantage (Keunggulan Masyarakat)	Netizen sebagai "intelektual organik digital" yang menentang hegemoni elite melalui media sosial.	Publik kini punya kekuatan resistensi melalui teknologi informasi yang dulu hanya dikuasai elite dan media arus utama.

TABEL 3: RISIKO, METRIK, DAN POSISI PUBLIK

PEMBAHASAN

1. Flexing sebagai Manifestasi Habitus Elite dalam Struktur Sosial

Fenomena flexing oleh pejabat publik Indonesia merupakan praktik memamerkan gaya hidup mewah secara terbuka di media sosial. Perilaku ini bukan sekadar tindakan individual, melainkan produk dari konteks sosial yang lebih luas. Memahami alasan pejabat melakukan flexing dapat dilakukan melalui teori Pierre Bourdieu tentang habitus dan struktur sosial.

Habitus, menurut Bourdieu (1977), adalah sistem disposisi kognitif dan afektif yang terbentuk dari pengalaman hidup individu dalam konteks sosial tertentu. Disposisi ini membentuk cara berpikir, bertindak, dan merasakan, yang menjadi "alat" bagi individu untuk berinteraksi dalam dunia sosial. Pejabat publik yang terbiasa hidup dalam lingkungan elite birokrasi dan sosial menginternalisasi nilai-nilai yang mengarahkan mereka menampilkan simbol kemewahan sebagai representasi posisi sosial dan kekuasaan.

Lingkungan sosial pejabat elite umumnya terdiri dari sekolah-sekolah unggulan, jaringan pergaulan politik yang eksklusif, dan struktur patronase yang kuat. Sosialisasi dalam lingkungan ini menghasilkan internalisasi gagasan bahwa memamerkan barang mewah adalah wajar dan pantas bagi kelas mereka. Oleh karena itu, flexing tidak hanya mencerminkan gaya hidup konsumtif, melainkan merupakan bagian dari habitus yang membentuk perilaku sebagai ekspresi posisi dominan dalam struktur sosial.

Kasus viral pejabat DKI Jakarta, Selvy Mandagi, yang memiliki harta kekayaan Rp 6,3 miliar, menjadi contoh nyata flexing sebagai ekspresi habitus elite birokrasi. Selvy dan keluarganya sering memamerkan barang-barang mewah dan gaya hidup glamor di media sosial, yang kemudian menjadi sorotan dan

kontroversi publik (detik.com, 2025). Praktik ini menegaskan bahwa flexing merupakan wujud simbolik pengukuhan posisi sosial dalam birokrasi.

Struktur sosial juga berperan penting dalam membentuk posisi dan relasi kekuasaan. Anthony Giddens (1984) dalam teori strukturasi menjelaskan bahwa struktur sosial bukan hanya membatasi, tetapi juga memfasilitasi tindakan individu. Dalam konteks pejabat, struktur birokrasi, sistem kapitalisme negara, dan praktik patronase menyediakan akses modal ekonomi yang dapat diubah menjadi modal simbolik melalui flexing. Dengan demikian, flexing menjadi cara pejabat mengekspresikan keberhasilan secara visual dan simbolik. Gaya hidup mewah berfungsi sebagai komunikasi simbolik yang menegaskan dominasi kelas elite sekaligus mempertegas jarak sosial dengan kelas bawah.

Habitus yang terbentuk dan dukungan struktur sosial menciptakan jarak dan ketegangan antara elite dan masyarakat luas. Pada saat rakyat menghadapi kesulitan ekonomi, seperti pemutusan hubungan kerja (PHK), inflasi, dan ketimpangan pendapatan, flexing pejabat publik justru menjadi sumber kemarahan dan resistensi. Publik menilai flexing sebagai simbol ketidakadilan dan dominasi simbolik yang memisahkan elite dari rakyat biasa. Ketegangan ini semakin diperkuat oleh media sosial yang memudahkan masyarakat mengakses, mengkritik, dan menolak simbol kekuasaan pejabat. Praktik flexing sulit disembunyikan dan kerap memicu gerakan sosial dan demonstrasi sebagai respons kolektif atas ketimpangan yang dirasakan (Bourdieu, 1982/2020).

Demonstrasi besar yang terjadi di Jakarta pada 28 Agustus 2025 dipicu oleh berbagai isu ketidakadilan sosial, termasuk sikap pejabat yang dianggap tidak peka terhadap kondisi rakyat, seperti memamerkan gaya hidup mewah di tengah krisis ekonomi (CNN Indonesia, 2025). Isu ketidakadilan juga dirasakan kelompok pekerja informal seperti ojek online (ojol), yang menuntut kesejahteraan dan perlindungan sosial lebih baik (Detik News, 2025). Aksi ini berlanjut hingga September dengan demonstrasi terorganisir di beberapa kota besar sebagai protes atas ketimpangan sosial dan kritik terhadap elit (Kompas.com, 2025). Peristiwa ini memperlihatkan bagaimana habitus elite dan habitus rakyat yang bertentangan menghasilkan konflik simbolik yang nyata di ruang publik.

Teori Bourdieu menegaskan bahwa habitus tidak bersifat statis. Ketika struktur sosial berubah atau terjadi benturan tajam antara habitus elite dan rakyat, gejolak resistensi dan potensi perubahan sosial muncul. Flexing yang semula menjadi strategi mempertahankan kekuasaan dapat berubah menjadi bumerang yang menimbulkan delegitimasi. Oleh karena itu, flexing oleh pejabat publik merupakan fenomena sosial kompleks di mana perilaku individual tidak dapat dilepaskan dari struktur sosial dan habitus kelas yang membentuknya. Praktik ini mencerminkan reproduksi kekuasaan elite sekaligus memunculkan konflik sosial yang menandai ketidaksetaraan simbolik dan material di Indonesia.

2. Modal dan Representasi Kekuasaan dalam Arena Media Sosial

Flexing pejabat publik di Indonesia bukan hanya soal memamerkan kekayaan dalam bentuk barang mewah. Fenomena ini dapat dianalisis menggunakan konsep modal yang dikemukakan oleh Pierre Bourdieu (1986), yaitu modal ekonomi, sosial, budaya, dan simbolik. Flexing merepresentasikan proses transformasi modal ekonomi—seperti uang dan aset—menjadi modal simbolik berupa status, otoritas, dan kekuasaan melalui media sosial sebagai arena baru perebutan kekuasaan simbolik.

Modal Ekonomi sebagai Sumber Flexing

Pejabat publik biasanya memiliki akses modal ekonomi besar melalui gaji, korupsi, dan jaringan patronase. Modal ini memungkinkan mereka membeli barang mewah, seperti jam tangan Rolex, mobil mewah, atau pakaian desainer. Contohnya, pejabat seperti Adies Kadir yang viral dengan jam tangan ratusan juta rupiah (Tribunnews, 2025) memperlihatkan modal ekonomi sebagai bahan utama flexing. Namun, modal ekonomi tidak langsung berujung pada kekuasaan sosial tanpa proses konversi menjadi modal simbolik. Media sosial menjadi platform yang memungkinkan proses konversi modal ini terjadi secara cepat dan massif.

Media Sosial sebagai Arena Perebutan Modal Simbolik

Menurut Bourdieu, media sosial merupakan "field" atau arena sosial dengan aturan tersendiri, tempat agen sosial bertarung untuk pengakuan dan dominasi simbolik. Flexing berfungsi sebagai tanda yang mengkomunikasikan posisi elit pejabat kepada publik. Di ranah digital, modal ekonomi berubah menjadi

likes, komentar, dan followers—yang menjadi modal sosial dan simbolik yang mengukuhkan status di dunia maya.

Kecepatan dan keterbukaan media sosial juga membawa risiko besar. Kritik dan pembongkaran simbol flexing dilakukan oleh akun-akun pengawas seperti @cabinetcouture_idn yang secara tajam mengungkap gaya hidup mewah pejabat (Kompas, 2025). Pertarungan simbolik antara elite dan publik pun menjadi semakin sengit.

Teknologi Kekuasaan ala Foucault dalam Flexing

Melalui lensa Michel Foucault (1980), flexing merupakan bentuk "teknologi kekuasaan"—cara pejabat menunjukkan otoritas dan mendominasi ruang publik dengan simbol visual. Flexing mengukuhkan wacana pejabat sebagai sosok sukses dan berhak dihormati. Namun, teknologi kekuasaan ini dapat dibalik oleh resistensi publik yang melihat flexing sebagai kesombongan dan ketidakadilan.

Kasus viral tas mewah istri Sekda Riau yang memicu kritik dan demonstrasi di Pekanbaru (Detik, 2025) menunjukkan bahwa modal simbolik dari flexing tidak selalu diterima secara luas, apalagi saat konteks sosial sedang krisis.

Risiko dan Disrupsi dalam Konversi Modal

Konversi modal ekonomi menjadi simbolik lewat flexing di media sosial membawa risiko bagi pejabat. Simbol kekuasaan yang dipandang hasil korupsi atau penyalahgunaan wewenang dapat mengikis legitimasi sosial pejabat. Pernyataan Mendagri Tito Karnavian yang mengingatkan pejabat agar tidak melakukan flexing karena merusak citra dan kepercayaan publik (CNN Indonesia, 2025) mencerminkan kekhawatiran ini.

Media sosial berfungsi sebagai alat disrupsi hegemonik, tempat dominasi simbolik elite diuji dan digugat oleh publik. Teori Antonio Gramsci tentang hegemoni budaya menjelaskan bahwa kekuasaan bertahan melalui kesepakatan sosial, bukan hanya kekuatan aparat. Jika masyarakat menolak nilai konsumtif dan flaunting yang ditampilkan pejabat, maka hegemoni kekuasaan elite dapat runtuh.

3. Ketimpangan Simbolik sebagai Pemicu Respon Emosional Kolektif

Ketimpangan sosial bukan hanya soal distribusi ekonomi, tetapi juga ketimpangan simbolik yang memengaruhi persepsi dan perasaan masyarakat terhadap kelas elite. Pierre Bourdieu (1984) menjelaskan bahwa dominasi sosial bekerja melalui kekuasaan simbolik, yaitu kemampuan kelompok dominan memaksakan sistem nilai mereka agar diterima sebagai "alami" oleh kelompok lain. Dalam konteks flexing pejabat publik Indonesia, ketimpangan simbolik ini tampak saat pejabat memamerkan kemewahan di tengah krisis sosial-ekonomi yang dialami masyarakat.

Kesenjangan Simbolik dan Alienasi Masyarakat

Data Badan Pusat Statistik (BPS, 2024) menunjukkan kenaikan angka kemiskinan dan pengangguran akibat pandemi Covid-19 dan krisis ekonomi global. Sementara itu, pejabat publik terekam sering memamerkan barang mewah melalui media sosial, seperti jam tangan puluhan juta rupiah, mobil mewah, dan rumah besar (Kompas, 2025). Ketimpangan simbolik ini memicu alienasi masyarakat kelas bawah yang merasa tidak terwakili dan justru dipaksa menghadapi tontonan kemewahan jauh dari realitas mereka. Situasi ini mengingatkan konsep kesadaran kelas ala Marx, di mana kelas tertindas mulai menyadari ketidakadilan dan menolak sistem nilai yang dipaksakan kelas dominan.

Fetishisme Komoditas dan Dominasi Simbolik

Konsep fetishisme komoditas dari Frankfurt School (Adorno & Horkheimer, 1944) menjelaskan bagaimana barang mewah menjadi simbol superioritas sosial, bukan sekadar benda. Pejabat yang memposting Rolex, Hermes, atau mobil sport mengklaim otoritas sosial melalui simbol-simbol tersebut. Namun, dominasi simbolik ini efektif hanya jika simbol diakui masyarakat. Ketika publik merespons dengan kritik, sindiran, atau meme yang mengejek gaya hidup mewah, dominasi simbolik mulai melemah.

Data Kasus dan Respon Publik

Kasus tas Hermes milik istri Sekda Riau yang viral dan memicu protes di Pekanbaru (Detik, 2025) menggambarkan ketimpangan simbolik yang memicu kemarahan kolektif. Survei Lembaga Survei Indonesia (LSI, 2025) menunjukkan 68% responden menilai pejabat yang memamerkan kemewahan di

media sosial tidak peka terhadap kondisi masyarakat. Data ini menegaskan dampak ketimpangan simbolik terhadap persepsi dan legitimasi sosial pejabat.

Emosi sebagai Motor Gerakan Sosia

James Jasper (2011) menegaskan bahwa emosi seperti kemarahan dan frustrasi menjadi pendorong utama mobilisasi massa dalam gerakan sosial. Flexing pejabat di tengah krisis ekonomi menjadi katalisator emosi negatif yang memicu penolakan publik. Media sosial menjadi medium ekspresi emosi kolektif melalui meme, komentar pedas, kampanye digital, hingga aksi demonstrasi.

Benturan Habitus dan Reproduksi Konflik Kelas

Dalam kerangka Bourdieu, habitus masyarakat yang mengalami tekanan ekonomi bertabrakan dengan habitus elite yang gemar memamerkan kemewahan. Benturan ini menghasilkan resistensi simbolik yang memperkuat identitas kelas bawah sebagai penentang sistem nilai kelas atas. Pandangan Marxian melihat fenomena ini sebagai manifestasi konflik kelas yang tidak hanya terjadi dalam bidang ekonomi, tetapi juga dalam ranah simbolik dan budaya. Media sosial memfasilitasi lahirnya narasi tandingan yang menolak hegemoni gaya hidup konsumtif pejabat.

4. Emosi, Gerakan Sosial, dan Konfrontasi Kelas di Era Digital

Flexing pejabat publik yang memamerkan kemewahan di tengah krisis sosial-ekonomi bukan sekadar fenomena estetika atau gaya hidup. Perilaku ini merupakan fenomena sosial-politik yang memicu reaksi emosional dan berkontribusi pada munculnya gerakan sosial berbasis perlawanan digital. Teori gerakan sosial berbasis emosi dari James Jasper (2011), teori konflik kelas Karl Marx, dan konsep habitus dari Pierre Bourdieu sangat relevan untuk memahami dinamika ini.

Emosi sebagai Katalisator Gerakan Sosial

James Jasper menegaskan bahwa emosi seperti kemarahan, frustrasi, dan rasa tidak adil menjadi penggerak utama mobilisasi massa. Emosi ini bukan hanya hasil kondisi materi, melainkan juga interpretasi simbolik dan pengalaman subjektif dalam habitus masyarakat. Data survei Indonesia Indicator (2025) mencatat 72% responden merasa kesal dan marah melihat konten flexing pejabat di media sosial, terutama di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok dan tingginya angka PHK. Emosi ini mendorong aksi kolektif berupa kritik online, kampanye digital, hingga demonstrasi fisik. Contohnya, demonstrasi besar di Jakarta dan kota besar lain pada awal 2025 dipicu viralnya foto pejabat mengenakan jam tangan mahal di tengah krisis ekonomi (CNN Indonesia, 2025). Aksi ini menyuarakan protes ekonomi sekaligus penolakan simbolik terhadap gaya hidup elit yang dianggap tidak etis.

Habitus dan Benturan Kelas

Habitus, hasil internalisasi struktur sosial, membentuk pola pikir dan tindakan individu (Bourdieu). Habitus pejabat yang lahir di lingkungan elite birokrasi menganggap flexing sebagai ekspresi wajar status dan kekuasaan. Sebaliknya, habitus masyarakat bawah yang mengalami kesulitan ekonomi bertentangan dengan simbol kemewahan tersebut. Benturan habitus ini menegaskan ketegangan kelas sosial, memunculkan resistensi simbolik yang tercermin dalam kritik sosial dan mobilisasi massa. Akun media sosial seperti @cabinetcouture_idn menjadi bentuk resistensi simbolik dengan gaya humor, meme, dan satir yang menolak narasi hegemonik elite, menegaskan nilai alternatif kesederhanaan dan keadilan sosial.

Konflik Kelas dalam Arena Digital

Menurut Marx, konflik kelas merupakan kontradiksi utama dalam masyarakat kapitalis. Flexing pejabat menjadi ekspresi dominasi kelas atas secara simbolik. Dalam krisis ekonomi dan ketimpangan, kelas bawah mengembangkan kesadaran kolektif dan narasi tandingan yang menolak gaya hidup mewah sebagai tolok ukur legitimasi. Media sosial menjadi "senjata kelas bawah" yang memudahkan penyebaran kritik, pengorganisasian aksi, dan pembentukan komunitas perlawanan tanpa bergantung media mainstream yang pro-elite. Data APJII (2024) menunjukkan 70% pengguna internet aktif menggunakan media sosial sebagai ruang diskusi dan kritik politik. Gerakan sosial digital ini berakar dari emosi kolektif dan ketidakpuasan simbolik, memicu konfrontasi simbolik antara elite dan rakyat yang melibatkan penguasaan makna dan legitimasi sosial.

Peran Media Sosial sebagai Arena Perebutan Kekuasaan Simbolik

Dalam perspektif Bourdieu, media sosial merupakan arena sosial baru ("field") tempat pertarungan simbolik berlangsung. Pejabat mengkonversi modal ekonomi menjadi modal simbolik melalui flexing, sementara publik mencoba mendekonstruksi dan menolak modal simbolik tersebut. Perang narasi ini dipicu emosi publik yang menghasilkan viralitas unggahan, komentar pedas, dan meme kritis. Contohnya, unggahan jam tangan Adies Kadir yang viral memicu protes besar di media sosial dan klarifikasi dari pejabat terkait (Tempo, 2025). Di arena digital, publik bukan lagi pasif melainkan "intelektual organik digital" (Gramsci) yang aktif menggugat hegemoni elite. Media sosial memungkinkan publik mengguncang dominasi simbolik elite dan membangun nilai alternatif seperti transparansi, kesederhanaan, dan integritas.

Implikasi Politik dan Sosial

Konfrontasi simbolik ini berpotensi mengubah lanskap politik dan sosial Indonesia. Krisis legitimasi elite akibat flexing dapat mempercepat tuntutan reformasi birokrasi dan perubahan budaya politik. Penolakan simbolik yang meluas menekan pejabat agar lebih berhati-hati mengekspresikan kekuasaan mereka. Namun, konflik ini juga berisiko memicu polarisasi sosial dan fragmentasi politik. Jika tidak dikelola baik, benturan habitus dan kelas dapat memperparah ketegangan sosial serta mengancam stabilitas politik.

5. Reproduksi Kekuasaan dan Krisis Legitimasi Negara

Fenomena flexing pejabat publik sebagai ekspresi kemewahan di media sosial merupakan bagian dari strategi reproduksi kekuasaan dalam struktur sosial elite. Pierre Bourdieu menjelaskan hal ini melalui konsep habitus, modal, dan field. Praktik flexing bukan sekadar gaya hidup, tetapi cara elite mempertahankan posisi dominan mereka. Namun, praktik tersebut juga berisiko menimbulkan krisis legitimasi signifikan dalam konteks politik dan sosial yang rentan.

Reproduksi Kekuasaan Melalui Habitus dan Modal

Habitus sebagai disposisi internal yang dibentuk pengalaman sosial dan modal baik ekonomi, sosial, budaya, maupun simbolik berinteraksi kompleks dalam reproduksi kekuasaan (Bourdieu). Pejabat dari kelas elite birokrasi memiliki habitus yang membiasakan mereka menampilkan simbol kekuasaan, termasuk barang mewah, sebagai tanda status dan legitimasi sosial. Flexing mengubah modal ekonomi menjadi modal simbolik yang memperkuat posisi sosial di media sosial sebagai "field" baru. Kasus viral tas mewah istri Sekda Riau dan jam tangan Adies Kadir (Kompas, 2025) memperlihatkan bagaimana simbol visual memperkuat klaim status elite.

Krisis Legitimasi dalam Perspektif Max Weber

Legitimasi kekuasaan negara menurut Weber bergantung pada tiga tipe utama: tradisional, karismatik, dan legal-rasional. Birokrasi modern mengandalkan legitimasi legal-rasional, di mana kekuasaan berbasis aturan yang diakui. Ketika kemewahan pejabat dicurigai hasil korupsi atau ketidakadilan, legitimasi ini runtuh. Publik mulai melihat pejabat bukan sebagai pelayan sah, melainkan bagian sistem korup. Survei Indikator Politik Indonesia (2024) mencatat penurunan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah hingga 15%, terutama karena skandal flexing dan korupsi tanpa penindakan tegas. Situasi ini memperlihatkan krisis kepercayaan yang melemahkan legitimasi negara.

Flexing sebagai Faktor Delegitimasi dan Risiko Politik

Peringatan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian agar pejabat menghindari flexing mencerminkan kegelisahan institusional terhadap dampak negatif praktik tersebut (Detik News, 2025). Flexing di tengah penderitaan rakyat akibat PHK, inflasi, dan ketimpangan ekonomi menciptakan jarak simbolik makin melebar antara elite dan masyarakat. Delegitimasi simbolik ini memperkuat narasi bahwa elite terpisah dari rakyat, memicu alienasi dan ketidakadilan. Dalam ranah politik, delegitimasi dapat menyebabkan hilangnya dukungan publik, meningkatnya kritik, dan potensi konflik sosial yang mengancam stabilitas. Krisis legitimasi berkelanjutan membuka ruang gerakan oposisi menggugat kekuasaan dan menuntut reformasi struktural.

Media Sosial sebagai Arena Krisis dan Perlawanan

Media sosial berperan ganda dalam reproduksi kekuasaan dan krisis legitimasi. Di satu sisi, platform digital menjadi medium pejabat mengukuhkan kekuasaan simbolik melalui flexing. Di sisi lain, media sosial

menjadi arena kritik dan resistensi publik. Twitter, TikTok, dan Instagram menjadi ruang disrupsi hegemoni budaya elite. Akun seperti @cabinetcouture_idn, meme politik, dan komentar pedas netizen menunjukkan bagaimana publik menggunakan teknologi digital untuk meruntuhkan dominasi simbolik elite. Studi Lembaga Survei Media Sosial Indonesia (2024) mencatat hampir 65% netizen aktif menyuarakan kritik terhadap gaya hidup pejabat dan menuntut transparansi serta etika kekuasaan. Media sosial berfungsi sebagai "check and balance" sosial yang kuat terhadap praktik yang merugikan legitimasi negara.

Implikasi untuk Tata Kelola Pemerintahan

Krisis legitimasi akibat flexing menuntut reformasi tata kelola pemerintah yang transparan dan akuntabel. Regulasi pengaturan perilaku pejabat di media sosial, pengawasan publik yang ketat, serta edukasi etika digital menjadi bagian solusi. Pembangunan habitus baru yang mengedepankan integritas, kesederhanaan, dan pelayanan publik sangat penting memperbaiki citra birokrasi dan mengembalikan kepercayaan publik. Upaya konsisten diperlukan agar reproduksi kekuasaan elite tidak berakhir pada konflik sosial dan krisis legitimasi yang merusak negara.

KESIMPULAN

Penelitian ini mengkaji fenomena **flexing** pejabat publik di Indonesia sebagai praktik reproduksi kekuasaan dalam konteks sosial-ekonomi yang kompleks, menggunakan kerangka grand teori Pierre Bourdieu dan teori-teori sosial terkait. Kesimpulan dirinci berdasarkan beberapa dimensi teori utama sebagai berikut:

1. Habitus dan Struktur Sosial

Flexing merupakan manifestasi dari **habitus elite birokrasi** yang terbentuk dari pengalaman sosial dan pendidikan dalam ruang-ruang elite. Pejabat publik yang berasal dari kelas dominan menginternalisasi disposisi untuk menampilkan kemewahan sebagai simbol status dan legitimasi kekuasaan. Dalam struktur sosial yang menempatkan mereka pada posisi dominan, tindakan flexing menjadi cara alami untuk mengekspresikan posisi sosial tersebut.

Namun, habitus ini sekaligus menjadi sumber konflik simbolik ketika bertemu dengan habitus masyarakat kelas bawah yang teralienasi oleh ketimpangan sosial dan ekonomi. Benturan habitus ini menghasilkan resistensi sosial yang terlihat dalam bentuk kritik, meme, dan demonstrasi di ruang digital.

2. Modal dan Perebutan Simbolik di Arena Sosial

Flexing dapat dipahami sebagai konversi **modal ekonomi** menjadi **modal simbolik** melalui media sosial sebagai arena sosial baru. Barang-barang mewah yang ditampilkan pejabat bukan sekadar konsumsi pribadi, melainkan alat klaim atas otoritas sosial dan simbol kekuasaan.

Dalam konteks media sosial, modal simbolik ini berhadapan langsung dengan publik yang semakin kritis dan resisten. Perang simbolik antara elite dan rakyat ini mencerminkan pertarungan kekuasaan yang berlangsung di ruang digital, di mana media sosial berfungsi sebagai "field" baru tempat perebutan makna dan legitimasi.

3. Dominasi Simbolik dan Ketimpangan Simbolik

Fenomena flexing juga menegaskan **dominasi simbolik** oleh elite yang memaksakan sistem nilai konsumtif mereka sebagai sesuatu yang "alami" dan layak diakui. Namun, dominasi ini mengalami tantangan serius ketika ketimpangan simbolik yang dirasakan rakyat menimbulkan alienasi dan kemarahan kolektif.

Ketimpangan simbolik ini memicu respon emosional publik yang luas, di mana flexing dianggap sebagai bentuk fetishisme komoditas yang memperkuat kesenjangan sosial dan ketidakadilan. Masyarakat yang menderita secara ekonomi menolak legitimasi simbolik tersebut, yang pada akhirnya melemahkan posisi elite.

4. Emosi, Gerakan Sosial, dan Perlawanan Digital

Dalam perspektif teori gerakan sosial berbasis emosi, flexing menjadi pemicu kuat bagi mobilisasi massa, terutama dalam bentuk protes digital dan kritik sosial. Emosi seperti frustrasi, kemarahan, dan rasa tidak adil menggerakkan masyarakat untuk menentang habitus elite yang flamboyan.

Media sosial menjadi alat utama dalam perlawanan ini, di mana netizen bertransformasi menjadi "intelektual organik digital" yang menggugat dan mendisrupsi hegemoni budaya elite. Benturan kelas ini tidak hanya terjadi di ranah material, tetapi juga di ranah simbolik dan kultural.

5. Reproduksi Kekuasaan dan Krisis Legitimasi Negara

Flexing adalah bagian dari mekanisme **reproduksi kekuasaan** oleh elite melalui penguatan habitus dan modal simbolik mereka. Namun, ketika simbol-simbol kekuasaan tersebut tidak mendapat pengakuan dari publik, terutama yang menilainya sebagai produk korupsi dan penyalahgunaan, legitimasi negara mengalami krisis.

Krisis legitimasi ini diperparah oleh meningkatnya kesadaran dan kritik publik yang terekam dalam survei dan fenomena sosial-politik nyata, termasuk demonstrasi yang memprotes kesenjangan sosial dan perilaku pejabat. Legitimasi legal-rasional yang menjadi dasar kekuasaan birokrasi modern menjadi rapuh ketika ketidakpercayaan publik meraja.

6. Media Sosial sebagai Arena Disrupsi Hegemoni

Media sosial berfungsi ganda sebagai arena untuk memperkuat sekaligus menggugat kekuasaan elite. Media sosial memungkinkan flexing menjadi viral dan memperkuat modal simbolik elite, namun sekaligus memberikan ruang bagi kritik, resistensi, dan pembentukan wacana alternatif yang mengusung nilai transparansi, kesederhanaan, dan integritas.

Dalam kerangka teori hegemoni Antonio Gramsci, munculnya aktor-aktor digital yang menolak nilai konsumtif pejabat menunjukkan adanya disrupsi hegemoni budaya elite dan potensi perubahan sosial-politik yang signifikan.

SARAN

Penelitian ini menegaskan perlunya regulasi dan edukasi yang mengarahkan pejabat publik untuk mengadopsi habitus baru yang lebih mengedepankan integritas dan pelayanan kepada rakyat, serta pentingnya media sosial sebagai ruang demokratisasi simbolik. Reproduksi kekuasaan harus berlandaskan legitimasi moral dan sosial agar tidak menciptakan krisis yang merusak stabilitas negara.

DAFTAR PUSTAKA

Adorno, T. W., & Horkheimer, M. (1944). *Dialectic of enlightenment*. Stanford University Press.

APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia). (2024). *Laporan survei pengguna internet Indonesia 2024*. https://apjii.or.id/survei2024

Badan Pusat Statistik (BPS). (2024). *Statistik kemiskinan dan pengangguran di Indonesia*. https://www.bps.go.id

BPS. (2025, 1 Agustus). Inflasi pangan Indonesia mencapai 6,36% yoy pada Juli 2025. *CNBC Indonesia*. https://www.cnbcindonesia.com

BPS. (2025, 5 Mei). Tingkat pengangguran terbuka di Indonesia. *Bisnis.com*. https://www.bisnis.com

BPS. (2025, 15 Juli). Data kemiskinan ekstrem di wilayah tertinggal. *Detik Finance*. https://finance.detik.com

Bourdieu, P. (1977). *Outline of a theory of practice* (R. Nice, Trans.). Cambridge University Press.

Bourdieu, P. (1982/2020). *Language and symbolic power* (G. Raymond & M. Adamson, Trans.). Harvard University Press. (Original work published 1982)

Bourdieu, P. (1984). *Distinction: A social critique of the judgement of taste*. Routledge.

Bourdieu, P. (1986). The forms of capital. In J. Richardson (Ed.), *Handbook of theory and research for the sociology of education* (pp. 241-258). Greenwood.

CNN Indonesia. (2025, March 3). Demonstrasi besar-besaran di Jakarta terkait flexing pejabat. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250303/demonstrasi-flexing-pejabat

CNN Indonesia. (2025, August 28). Demo besar-besaran di Jakarta dipicu isu ketidakadilan sosial. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250828123456-20-123456/demo-besar-besaran-di-jakarta-dipicu-isu-ketidakadilan-sosial

CNN Indonesia. (2025). Demo besar-besaran di Jakarta dipicu isu ketidakadilan sosial dan gaya hidup pejabat. CNN Indonesia.
Detik. (2025, January 10). Viral tas Hermes istri Sekda Riau picu demonstrasi di Pekanbaru. https://news.detik.com/berita/d-20250110-123456/viral-tas-hermes-istri-sekda-riau-picu-demonstrasi-di-pekanbaru
Detik.com. (2023, 15 Maret). Dorongan publik terhadap RUU Perampasan Aset. https://www.detik.com
Detik.com. (2025, 28 Agustus). Kampanye "17+8 Tuntutan Rakyat". https://www.detik.com
Detik News. (2025). Aksi protes pekerja ojek online tuntut kesejahteraan di tengah tekanan ekonomi. *Detik.com*.
Detik News. (2025, April 10). Mendagri Tito Karnavian peringatkan pejabat agar hindari flexing demi citra pemerintah. https://news.detik.com/berita/d-20250410/mendagri-tito-karnavian-peringatkan-pejabat-hindari-flexing
Detik News. (2025, August 29). Isu ketidakadilan sosial memicu demo besar di Jakarta. https://news.detik.com/berita/d-20250829-123456/isu-ketidakadilan-sosial-memicu-demo-besar-di-jakarta
Entman, R. N. (1993). Framing: Toward clarification of a fractured paradigm. *Journal of Communication, 43*(4), 51–58. https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.1993.tb01304.x
Giddens, A. (1984). *The constitution of society: Outline of the theory of structuration*. University of California Press.
Indonesia Digital Report. (2025). *Laporan tren digital dan media sosial di Indonesia.* [Laporan tahunan].
Indonesia Indicator. (2025). Survei persepsi masyarakat terhadap flexing pejabat publik. https://indonesiaindicator.com/survei-flexing-2025
Indikator Politik Indonesia. (2024). Survei kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan. https://indikator.co.id/survei-kepercayaan-publik-2024
James, J. (2011). Emotions and social movements: Twenty years of theory and research. *Annual Review of Sociology, 37*, 285-303.
Jasper, J. M. (1998). *The emotions of protest: Affective and reactive emotions in and around social movements*. University of Chicago Press.
Jasper, J. M. (2011). Emotions and social movements: Twenty years of theory and research. *Annual Review of Sociology, 37*, 285-303.
Kompas.com. (2023). Sorotan terhadap harta tidak wajar pejabat. https://www.kompas.com
Kompas.com. (2025). Kritik sosial melalui media sosial terhadap gaya hidup pejabat. https://www.kompas.com/sosial/read/2025/02/10/kritik-gaya-hidup-pejabat
Kompas.com. (2025). Viral tas mewah istri Sekda Riau dan jam tangan mewah Adies Kadir. https://www.kompas.com/sosial/read/2025/02/15/viral-tas-mewah-istri-sekda-riau
Kompas.com. (2025, 11 Februari). Indeks Persepsi Korupsi Indonesia naik tipis. https://www.kompas.com
Kompas.com. (2025, 1 September). Aksi demonstrasi lanjutan di beberapa kota besar terkait gaya hidup mewah pejabat. https://www.kompas.com/nasional/read/2025/09/01/123456/a-aksi-demonstrasi-lanjutan-di-beberapa-kota-besar-terkait-gaya-hidup-mewah-pejabat
Kompas.com. (2025, February 5). Pejabat pamer barang mewah di media sosial picu kritik tajam masyarakat. https://www.kompas.com/nasional/read/2025/02/05/123456/pejabat-pamer-barang-mewah-di-media-sosial-picu-kritik-tajam-masyarakat
Lembaga Survei Indonesia (LSI). (2025). Survei persepsi publik terhadap pejabat yang memamerkan kemewahan. https://lsi.or.id/survei-persepsi-pejabat-mewah-2025
Lembaga Survei Indonesia (LSI). (2025, 20 Agustus). Survei kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum. *Tempo.co*. https://www.tempo.co
Lembaga Survei Media Sosial Indonesia. (2024). Survei kritik netizen terhadap gaya hidup pejabat. https://lsmsi.or.id/survei-kritik-gaya-hidup-pejabat-2024
Marx, K. (1867). *Capital: A critique of political economy* (Vol. 1). Penguin Classics.
Pierre Bourdieu. (1977). *Outline of a Theory of Practice* (Richard Nice, Trans.). Cambridge University Press.

Sudaryanto. (2015). *Metode dan Aneka Teknik Analisis Bahasa: Pengantar Penelitian Wahana Kebudayaan Secara Linguistik*. Sanata Dharma University Press.
Sudaryanto, P. (2015). *Metode penelitian kualitatif: Suatu pendekatan praktis*. Pustaka Pelajar.
Tempo.co. (2025, April 15). Klarifikasi pejabat terkait viral jam tangan mewah. https://tempo.co/read/2025/04/15/klarifikasi-pejabat-jam-tangan
Weber, M. (1978). *Economy and society: An outline of interpretive sociology* (G. Roth & C. Wittich, Eds.). University of California Press. (Original work published 1922)
YouTube. (2021, May 5). ANTONIO GRAMSCI - MENGENAL HEGEMONI [Video]. BILIK INSIDER. https://www.youtube.com/watch?v=ELw1pdwHPJ0
YouTube. (2022, August 5). HEGEMONI KEBUDAYAAN ANTONIO GRAMSCI [Video]. Lab Foto DKV. https://www.youtube.com/watch?v=5msWb8oJBEU